

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Lima*, telah diselenggarakan Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi dari Bappeda mengenai Substansi Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dirangkum menjadi hasil diskusi sebagaimana notulen pada Lampiran III.

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan anggaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I, II, dan III), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini;
- KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan pemutakhiran Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Palembang, 22 Mei 2025

Perangkat Daerah :
Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi
Sumatera Selatan, ✓



Dian Eka Putra, STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19791112006041009

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan .



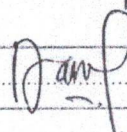
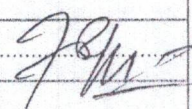
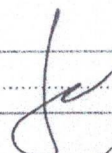
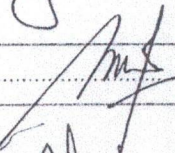
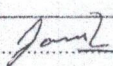
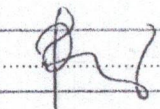
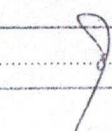
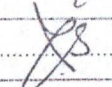
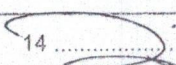
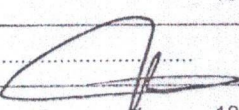
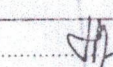
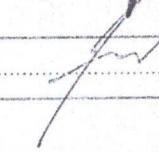
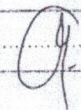
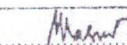
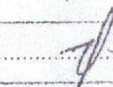
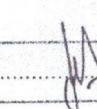
Hari Wibawa, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197303172007011021

**RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 DAN
PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025**

Hari / Tanggal
Pukul
Tempat

: Kamis / 22 Mei 2025
: 08.00 WIB s.d. selesai
: Ruang Rapat Bidang PPP Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

(Bidang PPP)

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Dian Elia Putra	Dinas perkebunan	1 
2	Joni Rudi	Dinas perkebunan	2 
3	Eva Arsanah	Dishub Sumsel	3 
4	Riky Pringgah	Dusun SUSASEL	4 
5	Susilo Hartono	Dinas lekat	5 
6	Neneng Keli Leliana	Dishub	6 
7	Ary Permewan P	Dishub	7 
8	Si Anika	Disperind	8 
9	M. Taufiq	Disperind	9 
10	Hepni Badewasta	"	10 
11	Powari-k	Disperind	11 
12	M. Rizal Umar	Disperind	12 
13	Bertha Yuli S	Dinas Pertanian TPH SS	13 
14	Dian Lestary	Dinas Pertanian TPH SS	14 
15	Olga Fuz Lestari	Dinas Pertanian TPH SS	15 
16	Ahmad Wazri	Dinas Pertanian TPH SS	16 
17	M-Sun	Bappeda	17 
18	Muniaritini	Bappeda	18 
19	Hani Wicaria	Bappeda	19 
20	DEMI SUSANTI	Bappeda Prov SS	20 
21	Manini	Bappeda Prov SS	21 
22	Irmuni Ismail	Bappeda P3	22 
23	M. Fauzi	"	23 
24	Ika Widiastuty	Bappeda SS	24 
25	Viesta Alvin	Bappeda Prov. SS	25 

Pimpinan Rapat

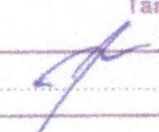
Hani Wicaria

DAFTAR HADIR

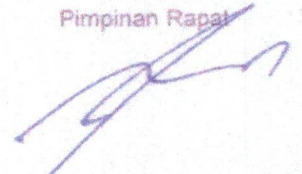
RAPAT PEMBAHASAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENJA PD TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Mei 2025
Pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang PPP Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

(Bidang PPP)

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Hani Wigana	Bappeda Prov	1 
2	Winda	Bappeda Prov ss	2 
3	Dian Septialisa	Bappeda Prov ss	3 
4	Ermita Fauziah	Bappeda Prov ss	4 
5	Firli Barita	Bappeda Prov ss	5 

Pimpinan Rapat


(Hani Wigana)



NOTULEN

Acara : Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Hari/Tanggal : Kamis / 22 Mei 2025
Waktu : 11.15 Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang PPP Lantai I Bappeda Provinsi Sumsel
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pimpinan rapat :

Point-point penting (skema/pola) Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :

1. Draft Renstra PD **mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025** (Bab dan Sub Bab)
2. **Tujuan pada Renstra PD dirumuskan dari NSPK atau pada Pohon Kinerja Level 2, 3, dan 4 dan berjumlah maksimal 1 Tujuan** (Termasuk OPD yang **mengampu lebih dari 1 Urusan**).
3. **Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan kalimat yang menjawab Tujuan Perangkat Daerah** (hubungan sebab akibat).
4. **Strategi pada Renstra PD disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pada Ranwal RPJMD.**
5. **Arah Kebijakan pada Renstra PD dirumuskan dari arah kebijakan pada Ranwal RPJMD.**
6. **Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Perangkat Daerah bersumber dari :** Indikator Tujuan dan Sasaran/IKK per Urusan dan IKD per Aspek yang **terseleksi atau relevan dengan Tusi PD (Lampiran Form Bank Indikator).**
7. Memastikan **keterisian target indikator pada Renstra PD dan Pagu Indikatif** sampai level sub Kegiatan dari tahun 2025-2030.
8. Agar **OPD Menyusun Pohon Kinerja Perangkat Daerah** dengan mempedomani Pohon Kinerja RPJMD (Format Pohon Kinerja OPD 2024-2026 dan Pohon Kinerja RPJMD 2025-2029 Terlampir).
9. Agar **OPD mengawal 12 Program Strategis pada Renstra PD** (Misal Tanjung Carat di Renstra Dishub, Revitalisasi Pasar di Renstra Disdag, Masjid Sriwijaya di Renstra Perkim, Pariwisata OKUS dan Pagaralam di Renstra Disbudpar, KSPP di Renstra Dinas Pertanian TPH, Sultan Muda dan Koperasi Merah Putih di Renstra Diskop)
10. **OPD agar Menyusun strategi dan arah kebijakan pada Renstra PD (Bahasa aksi)** dengan **merujuk pada 12 Program Strategis beserta turunannya.**

11. Output/Keluaran Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :

1. Lampiran 1 : Absen rapat
2. Lampiran 2 : Tabel 4.2, 4.3. dan. 4.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025
3. Lampiran 3 : Notulen Pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hasil Pembahasan :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan agar membuat cascading: tujuan, sasaran, outcome dan output yang harus dijawab oleh sub kegiatan.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak HDCU.
3. Bagaimana pelaksanaan dukungan terhadap program prioritas HDCU 2025-2029 khususnya yang mendukung Gerakan Sumsel mandiri Pangan (GSMP).
4. IKU Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan adalah Nilai Tukar Petani mengacu Inmen 2 Tahun 2025, terkait Urusan Pertanian mengacu tabel berikut :

27) Urusan Pertanian

TUJUAN INDIKATOR		Meningkatnya kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani (NTP)	
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	
Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	
Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	
		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	

DOKUMENTASI
PEMBAHASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029





TABEL 4.2. TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROV.SUMSEL

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah (masuk di misi ke 2) 2. Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) (masuk di misi ke 3)	1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	- 1.1. Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	-	-	-	1. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)		
						1.1 Persentase peningkatan produksi Karet (%)		
						1.2 Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit (%)		
						1.3 Persentase peningkatan produksi Kopi (%)		
						1.4 Persentase peningkatan produksi Kelapa (%)		
						1.5 Persentase peningkatan produksi Tebu (%)		
			1.1.1 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana		1.1.1 Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian		
				1.1.1.1 Meningkatnya pengawasan peredaran sarana pendukung pertanian	1.1.1.1 Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					1.1.1.2 Meningkatnya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	1.1.1.2 Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
							Sub kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
							Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	
							Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
							Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
							Sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.1.2 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1.1.2.1 Meningkatnya penataan prasarana pertanian	1.1.2 Jumlah prasarana pendukung perkebunan yang terawasi	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	
						1.1.2.1 Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
							Sub kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
							Sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan		1.2.1 Persentase penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						1.2.1.1 Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
							Sub Kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	
							Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	
							Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	
							Program Penyuluhan Pertanian	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				1.1.4 Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh	1.1.4.1 Meningkatnya pengembangan penerapan penyuluh pertanian	1.1.4.1. Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					1.1.3.1 Terlaksananya penerbitan Rekomtek usaha perkebunan yang kegiatan usahanya lintas kabupaten/kota	1.1.3.1 Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.1.4.2 Meningkatnya pembentukan kelembagaan pekebun berbasis kawasan (komoditi)	1.1.4.2 Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	
							Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
							Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	
							Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2026-2030
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2026	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			Tahun 2026 (RENSTRA 2024-2026)		Tahun 2026 (RENSTRA BARU)		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS PERKEBUNAN				28.337.096.947		28.340.000.000	-	29.735.000.000	-	31.050.000.000	-	32.570.000.000	-	34.402.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah			18.122.096.947		18.295.000.000	-	18.665.000.000	-	19.980.000.000	-	21.530.000.000	-	23.112.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			280.000.000		330.000.000		385.000.000		440.000.000		495.000.000		550.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	5	500.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah			12.248.832.065											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		792	11.918.832.065											
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		5	330.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000	6	370.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah														
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10	100.000.000	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
- Pembuatan Papan Nama Untuk Pengamanan Aset Negara															
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-	400.000.000	-	285.000.000	-	400.000.000,00	-	450.000.000,00	-	520.000.000,00	-	520.000.000,00	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1	200.000.000	1	135.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10	200.000.000	12	150.000.000	15	200.000.000,00	15	200.000.000	17	250.000.000	17	250.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah			1.550.000.000		1.100.000.000	-	1.350.000.000	-	1.360.000.000	-	1.465.000.000	-	1.520.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1	500.000.000	3	300.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		3	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000,00	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		150	850.000.000	150	650.000.000	150	700.000.000,00	150	700.000.000,00	150,0	750.000.000,00	150,0	750.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			845.000.000		1.225.000.000	-	1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		1	500.000.000	1	800.000.000	2	700.000.000,00	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		10	195.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		35	150.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	
Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			1.690.000.000		1.355.000.000	-	1.355.000.000	-	1.355.000.000	-	1.355.000.000	-	1.355.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	12	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	24	24	1.120.000.000	12	780.000.000	12	780.000.000	12	780.000.000	12	780.000.000	12	780.000.000
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	1.108.264.882	-	1.650.000.000	-	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-	1.700.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		90	850.000.000	90	800.000.000	90	850.000.000	90	850.000.000	90	850.000.000	90	850.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		20	68.264.882	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	190.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000
Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	0,38	0,39	2.645.000.000	0,39	3.150.000.000	-	3.450.000.000	-	3.550.000.000	-	3.620.000.000	-	3.870.000.000
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Periode pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian		-	2.145.000.000	-	850.000.000	-	850.000.000	-	900.000.000	-	900.000.000	-	900.000.000
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian		4	2.145.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan				1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Periode pelaksanaan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman		-	500.000.000	-	2.300.000.000	-	2.600.000.000	-	2.650.000.000	-	2.720.000.000	-	2.970.000.000
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		4.200	500.000.000	4.100	200.000.000	4.200	500.000.000	4.300	550.000.000	4.400	600.000.000	4.500	650.000.000
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000

Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang				150000	2.000.000.000	150000	2.000.000.000	150000	2.000.000.000	150.000	2.000.000.000	150.000	2.200.000.000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Periode pengelolaan SDG tumbuhan kewenangan provinsi		-	-	-	134.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	170.000.000	-	170.000.000	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme				1	134.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	
Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan	13,59	13,70	350.000.000	13,70	150.000.000	-	350.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	
Penataan Prasarana Pertanian	Periode pelaksanaan penataan prasarana perkebunan			350.000.000		150.000.000		350.000.000		250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya		4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi		1	300.000.000	1	100.000.000	2	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	550	650	850.000.000	650	400.000.000	0	850.000.000	-	850.000.000	-	850.000.000	-	850.000.000	
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Periode pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sektor perkebunan			850.000.000		400.000.000		850.000.000		850.000.000	-	850.000.000	-	850.000.000	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		600	500.000.000	550	200.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		250	350.000.000	200	200.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan	316	316	100.000.000	316	75.000.000	316	100.000.000	316	100.000.000					

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota				100.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	
Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		20	100.000.000	18	75.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	91	92	6.270.000.000	92	6.270.000.000	-	6.320.000.000	-	6.320.000.000	-	6.320.000.000	-	6.320.000.000	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				6.220.000.000		6.220.000.000		6.220.000.000		6.220.000.000	-	6.220.000.000	-	6.220.000.000	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		94	6.220.000.000	93	6.220.000.000	94	6.220.000.000	100	6.220.000.000	100	6.220.000.000	100	6.220.000.000	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan				50.000.000		50.000.000		100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi		1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMSEL

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2023*	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan produksi Karet	%		0,028	0,029	0,031	0,032	0,035	
		Ton	1.003.780,130	1.031.885,974	1.061.810,667	1.094.726,798	1.129.758,055	1.169.299,587	
2	Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%		0,290	0,300	0,320	0,330	0,360	
		Ton	3.370.527,92	4.347.981,017	4.381.686,296	4.449.096,854	4.482.802,134	4.583.917,971	
3	Persentase peningkatan produksi Kopi	%		0,020	0,040	0,060	0,080	0,100	
		Ton	206.655,70	210.788,814	214.921,928	219.055,042	223.188,156	227.321,270	
4	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%		0,008	0,009	0,010	0,020	0,021	
		Ton	61.563,76	62.056,270	62.117,834	62.179,398	62.795,035	62.856,599	
5	Persentase peningkatan produksi Tebu	%		0,300	0,600	0,900	0,170	0,180	
		Ton	26.317,00	34.212,10	42.107,20	50.002,30	30.790,89	31.054,06	

Note : 2023* adalah ATAP 2023 Statistik Perkebunan Provinsi Sumsel